

## Implementasi Kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan 20 Ilir D.1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang


Tri Mulia Franchika<sup>1\*</sup>, Grace Twenty Agustine<sup>2</sup>, Adella<sup>3</sup>, M. Farhan Putra Perdana<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>Ilmu Administrasi Negara, STIA Bala Putra Dewa, Jl. Urip Sumoharjo, 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan

<sup>2</sup>Manajemen, Universitas Sumatera Selatan, Jl. Letnan Murod No. 55, Talang Ratu KM. 5, Palembang

E-mail: [trimuliafranchikasipmsi@gmail.com](mailto:trimuliafranchikasipmsi@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.7196>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 05 June 2026

Revised: 18 June 2026

Accepted: 27 June 2026

#### Kata Kunci:

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Kota Palembang

#### Keywords:

Village Community Empowerment, Policy Implementation, Palembang City

### ABSTRACT

Kegiatan ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan 20 Ilir D.1, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, beserta kendalanya. LPMK merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan difasilitasi pemerintah untuk mendukung pembangunan serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan LPMK berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn telah berjalan cukup optimal pada enam dimensi, yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Namun, implementasi masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan anggaran yang dimiliki LPMK.

*This activity aims to analyze the implementation of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) policy in 20 Ilir D.1 Village, Ilir Timur I District, Palembang City, along with its obstacles. LPMK is an institution formed on the initiative of the community and facilitated by the government to support development and act as a liaison between the government and the community. The study used a qualitative descriptive method with a policy implementation approach. The results show that the implementation of LPMK policies based on the Van Meter and Van Horn theory has been running quite optimally in six dimensions, namely size and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, attitudes of implementers, communication between implementers, and the economic, social, and political environment. However, implementation is still hampered by limited resources and budgets owned by LPMK.*



*This is an open access article under the CC-BY-SA license.*

**How to Cite:** Muktamir Usman, et al (2026). Tantangan Tata Kelola dan Inklusi Digital dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia, 4(4) 28363-28373. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.7196>

### PENDAHULUAN

Palembang memiliki berbagai fasilitas publik, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, dan universitas. Namun, seperti kota besar lainnya Palembang juga menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah infrastruktur, kemacetan, sampah, dan kesenjangan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kota sangat diperlukan, Maka sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 di bentuklah lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang di bentuk oleh masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat yang di fasilitasi pemerintah melalui

musyawarah aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) merupakan salah satu alat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, serta berperan dalam pengembangan potensi masyarakat di kelurahan. Keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat daya tampung sosial dan ekonomi masyarakat.

Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa kegiatan kelurahan. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana yang ada di Kelurahan (Muhmmad Juli et al, 2015). Program pembangunan kelurahan dapat menjadi salah satu upaya memajukan suatu kelurahan baik dalam masyarakat ataupun pemerintah.

Pada peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa turun pada peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) yang mana di atur pada pasal 4 ayat 2 lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) merupakan mitra pemerintah kelurahan.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) juga memiliki tugas yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) pada pasal 5 berbunyi:

1. melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan,
2. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan
3. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

Pelaksanaan tugasnya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah kelurahan. Tujuannya untuk meningkatkan daya masyarakat dalam kesejahteraan kelurahan.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) juga memiliki fungsi yang dimana telah di atur dalam peraturan daerah (perda) nomor 4 tahun 2019 ayat 6 yang berbunyi:

1. menampung dan menyaluran aspirasi masyarakat
2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat kelurahan
4. Menyusun rencana, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat
5. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) bisa menjadi faktor kurang maksimalnya dalam pemberdayaan masyarakat. hal ini didasarkan ketidaktahuan masyarakat terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK). Implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang menjadi sangat relevan, memperhatikan masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat pada lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di wilayah 20 ilir D.1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah penduduk dari Rt 001 sampai 040 (per kk) yang mengetahui dan tidak mengetahui LPMK di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang

Tahun	Jumlah penduduk (per kk)	Mengetahui	Tidak mengetahui	Persentase
	RT 001 - 040	RT 001 - 040	RT 001 - 040	
2022	2925	204	2721	81,86%
2023	3332	371	2961	
2024	3110	560	2550	50,94%

Sumber: ketua LPMK

Data diatas menunjukkan pada tahun 2022 sampai dengan 2023 ada peningkatan sebesar 81,86% pada penduduk (per kk) mengetahui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dan pada tahun 2023 sampai dengan 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 50,94% pada penduduk (per kk) mengetahui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), akan tetapi jumlah penduduk (per kk) yang tidak mengetahui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) juga masih sangat banyak. Pada data di atas tahun 2022 sebanyak 2721 kk yang tidak mengetahui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dan tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah penduduk (per kk) sebanyak 3332 kk yang dimana menyebabkan kenaikan angka tidak mengetahui masyarakat pada lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) sebanyak 2961 kk. Kemudian tahun 2024 penduduk (per kk) mengalami penurunan sebanyak 3110 kk dan jumlah masyarakat yang tidak mengetahui pun ikut turun sebanyak 2550 kk.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang akan menghasilkan deskripsi data secara tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diteliti bersifat deskriptif dan bukan numerik, seperti dalam penelitian kuantitatif.

Penelitian ini akan mempelajari pemerintahan kota Palembang, khususnya di bagian lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota Palembang yang menangani dalam hal membantu pemberdayaan pembangunan kelurahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. informan penelitian lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota Palembang yaitu Lurah, Kasi. Pemberdayaan masyarakat, ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat.

Prosedur yang digunakan yaitu Wawancara merupakan proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius yang sudah ditentukan untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Zuhri Abdussamad (2021:143), Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan (Dewi Sadiyah 2015: 87), peneliti menggunakan literatur berupa buku yang digunakan untuk mengambil teori implementasi kebijakan, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, serta menggunakan dokumen-dokumen atau penelitian yang sudah ada seperti jurnal dan skripsi untuk memenuhi keperluan penelitian. Menurut sugiyono (2018:476) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. instrumen penelitian berupa wawancara, observasi dan alat rekam.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman dalam buku Zuchri Abdussamad (2021: 160) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van meter dan Van horn yang disebut dengan A model of The policy Implementations. Menurut Van meter dan Van horn ada enam variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Keenam variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, politik. teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan publik khususnya untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).

### **Ukuran dan Tujuan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh maka hasil penelitian di atas untuk dimensi ukuran dan tujuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ukuran dan tujuan dari implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota Palembang adalah mengukur sejauhmana

keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK). lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 sudah cukup maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMK) diatas menjelaskan tugas dan fungsinya sebagaimana kejelasan pada implementasi kebijakan. Peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 pada pasal 5 dan pasal 6 tersebut belum sepenuhnya terealisasikan, karena keterbatasan anggaran yang ada di lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1. Namun, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 tetap memaksimalkan salah satu kegiatan mentoring himbauan masalah parkir liar di wilayah kelurahan 20 ilir D.1

Berdasarkan hasil dari mentoring himbauan masalah parkir liar di wilayah kelurahan 20 ilir d.1 ialah setiap bulan pihak kelurahan akan melakukan mentoring terkait masalah parkir liar di wilayah kelurahan 20 ilir D.1 yang akan bekerja sama dengan bhabinkamtibmas dan babinsa agar seluruh wilayah di kelurahan 20 ilir D.1 tidak terjadinya kemacetan yang bisa menghambat aktifitas masyarakat.

Konsistensi merupakan kondisi dimana terdapat kesesuaian antara perkataan dengan tindakan. Konsistensi juga suatu ketetapan dan kemantapan dalam bersikap atau bertindak maupun selalu sesuai antara perbuatan dan ucapan.

Pada peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) pasal 6 yang dimana lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) selalu konsistensi dalam melaksanakan fungsi nya. Berikut adalah salah satu kegiatan musrembang yang di hadiri oleh lurah, LPMK, ketua RT/RW, ketua PKK dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan 20 ilir D.1 tahun 2025

Sumber: hasil dokumentasi lapangan dari Ketua LPMK 12 februari 2025

Penjelasan hasil musrembang tahun 2025 pada gambar di atas ialah pertama, usulan perbaikan jalan dari rt 37, rt 39, rt 36, rt 09, rt 10, dan rt 11. Kedua, usulan rehab saluran air rt 01, rt 02, rt 03, rt 04, rt 10 dan rt 11. Ketiga, rehab pos kamling rt 04. Berdasarkan hasil musrembang tahun 2025 di atas merupakan kumpulan-kumpulan hasil dari aspirasi masyarakat di kelurahan 20 ilir D.1 dalam lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1. Namun, hasil dari musrembang tersebut baru termasuk usulan dan belum terlaksana karena anggaran dari usulan tersebut belum turun yang mengakibatkan belum terlaksananya sampai sekarang.

Selain musrembang adapun kegiatan kegiatan lain yang dilakukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 yang mendukung rutinitas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang akan di tampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kegiatan rutin lembaga pemberdayana masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1

No	Kegiatan Rutin	Keterangan
1	Gotong royong membersihkan lingkungan di setiap RT	Kegiatan dilaksanakan setiap hari jumat
2	Arisan bulanan LPMK	Setiap bulan akan digelar arisan di rumah pengurus LPMK
3	Arisan kurban idul adha yang di ikuti setiap RT	Kegiatan ini dilakukan pada lebaran idul adha
4	Musrembang	Kegiatan ini dilakukan setiap awal tahun

Sumber:dari laporan LPMK diolah oleh peneliti

Keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat mengetahui hasil yang diperoleh dan apa yang harus di persiapkan untuk evaluasi kekurangan yang didapat agar untuk pelaksanaan implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) selanjutnya mendapatkan hasil yang optimal dari sebelumnya.

### Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya manusia menjadi elemen paling penting dalam menentukan suksesnya proses implementasi tersebut. Setiap tahap dalam keseluruhan proses implementasi memerlukan kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang diamanatkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, apabila kompetensi dan kapabilitas sumber daya ini minim atau bahkan tidak ada, maka pelaksanaan kebijakan publik akan menghadapi banyak kendala dan akan sulit untuk dijalankan dengan efektif.

Sumber daya manusia internal lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 terbilang mencukupi dikarenakan memiliki 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara, dan 9 bidang lain yang memiliki tugas dan fungsi masing masing. Namun, dari 9 bidang tersebut belum secara maksimal dalam membantu Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam hal menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana pada peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), diakibatkan karena faktor keterbatasan anggaran yang belum mencukupi untuk melakukan tugas dan fungsi. Namun, mereka tetap melakukan semaksimal mungkin dalam membantu ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) melakukan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 20 ilir D.1.

### Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam melihat karakteristik organisasi pelaksana seperti yang dinyatakan oleh Van meter dan Van horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari jobdesk yang telah di atur pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).

Karakteristik agen pelaksana menjadi fokus penting dalam kinerja implementasi kebijakan publik, karena kualitas implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat yang tepat dan sesuai dengan para agen tersebut. Jika diumpamakan, implementasi kebijakan publik yang bertujuan untuk mengubah perilaku atau tindakan manusia secara signifikan memerlukan agen pelaksana yang memiliki karakter tegas dan disiplin dalam mengikuti aturan serta sanksi hukum. Sebaliknya, apabila kebijakan yang diterapkan tidak terlalu mengubah perilaku dasar manusia, agen pelaksana yang ditunjuk bisa jadi tidak sekeras dan seketat dalam menghadapi situasi tersebut. Selain itu, faktor cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu dipertimbangkan saat menentukan agen pelaksana.

Jobdesk merupakan paparan lengkap tentang tugas tugas yang harus dilakukan oleh seorang pemegang jabatan untuk menghasilkan pekerjaan tertentu dalam kondisi tertentu. Uraian tugas harus ditulis secara singkat, jelas, dan berurutan, mulai dari tugas paling berat hingga tugas paling ringan.

Jobdeck pada implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang ialah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Jobdeck lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019

<b>Jabatan</b>	<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
Ketua	Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggung jawab LPMK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi.</li> <li>b. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPMK.</li> <li>c. Membina KPMK sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis.</li> </ul>
Wakil ketua	Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan LPMK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan.</li> <li>b. Melaksanakan tugas tertentu yang di berikan oleh ketua.</li> <li>c. Melaksanakan koordinasi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan pariwisata.</li> <li>2. Ketua bidang organisasi kelembagaan.</li> <li>3. Ketua bidang adat, keamanan dan ketertiban masyarakat.</li> <li>4. Ketua bidang peningkatan sumber daya manusia.</li> <li>5. Ketua bidang pemberdayaan ekonomi dan produk unggulan masyarakat.</li> <li>6. Ketua bidang penelitian dan perencanaan pembangunan.</li> <li>7. Ketua bidang kesehatan dan lingkungan hidup.</li> <li>8. Ketua bidang kesenian, pemuda, dan olahraga.</li> <li>9. Ketua bidang komunikasi, media dan informasi.</li> </ul> </li> </ul>
Sekretaris	Sekretaris LPMK mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan pendataan.</li> <li>b. Menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh bidang.</li> <li>c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.</li> <li>d. Melaksanakan tugas ketua, wakil ketua bilamana semuanya berhalangan.</li> </ul>
Bendahara	Bendahara LPMK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang/surat-surat berharga dan barang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang.</li> <li>b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam</li> </ul>

Ketua bidang	Ketua bidang adalah unsur pelaksanaan yang mempunyai tugas membantu ketua dan wakil ketua dalam memimpin dan mengendalikan kelompok kerja bidang masing-masing sesuai tugasnya.	pembangunan yang dinilai dengan uang. a. Menyusun rencana pembanguna sesuai bidang masing-masing. b. Menyelenggarakan kegiatan pembanguna sesuai dengan rencana yang ditetapkan. c. Melakukan koordinasi dengan bidang lain untuk terwujudnya keserasian dalam pelaksanaan pembangunan. d. Mengendalikan kelompok kerja untuk melaksanakan program-program kerja. e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan masing-masing kelompok kerja. f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam bidangnya. g. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan h. Menyusun laporan secara berkala. i. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya. j. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.
--------------	---	---

*Sumber:* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/124424/perda-kota-palembang-no-4-tahun-2019> *BPK RI di akses 23 april 2025*

Berdasarkan hasil table diatas merupakan tugas dan fungsi masing masing pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 pada jobdeck di atas sebagaimana telah di atur pada peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.

lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) sudah berjalan cukup maksimal karena dengan adanya tugas dan fungsi masing masing pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dapat berjalan dengan baik.

#### **Sikap/Disposisi Para Pelaksana**

Sikap/Disposisi para pelaksana implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang merupakan tingkat kepatuhan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) untuk melaksanakan perintah ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Disposisi atau sikap para pelaksana adalah aspek penting yang diidentifikasi oleh Van Mater dan Van Horn, yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan publik. Variabel ini merujuk pada keinginan atau kesepakatan di antara para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Agar penerapan kebijakan berjalan dengan efektif, pelaksana tidak hanya perlu memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, serta memiliki motivasi dan keinginan yang kuat untuk mengimplementasikannya.

Sikap/disposisi para pelaksana implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang merupakan tingkat

kepatuhan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) untuk melaksanakan perintah ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Diketahui bahwa sikap para pelaksana dalam lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 antara ketua dan jajaranya mereka selalu menanggapi dengan positif supaya bisa cukup maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi.

#### **Komunikasi Antar Pelaksana**

Komunikasi antar pelaksana dilakukan secara terstruktur dari Pak Lurah lalu Kasi. Pemberdayaan masyarakat kemudian sampai ke Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) begitu juga sebaliknya dan komunikasi dari kelurahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) salah satunya menggunakan aplikasi whatsapp agar mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada pada laporan LPMK yang dimana untuk pengumpulannya memiliki waktu per satu tahun sekali yang akan diserahkan ke kantor kelurahan lalu kemudian ke kantor kecamatan. komunikasi antar pelaksana dilakukan dengan baik dan maksimal.

#### **Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik**

Berdasarkan analisis maka hasil penelitian atas dimensi lingkungan ekonomi, sosial, politik adalah sebagai berikut: lingkungan ekonomi, sosial, politik sudah berjalan dengan baik karena masyarakat kelurahan dan kecamatan serta lembaga dan organisasi lainya mendukung akan kegiatan-kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).

Kondisi ekonomi masyarakat implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota Palembang ialah masyarakat kelurahan 20 ilir D.1 kebanyakan masyarakat yang dari kalangan menengah ke bawah. Namun dalam mendukung kegiatan-kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 masyarakat pasti akan ikut andil dan membantu lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam melakukan kegiatan kegiatannya tingkat kesadaran masyarakat harus didukung dari pemerintahan kelurahan dan kecamatan terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK)

Dukungan dari kelurahan dan kecamatan melalui pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) tentu sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ikut serta pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sehubungan dengan pendapat buk kartini kasi. faktor lingkungan ekonomi, sosial, politik sudah berjalan dengan baik karena masyarakat kelurahan dan kecamatan serta lembaga dan organisasi lainya

mendukung akan kegiatan-kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK). Adapun faktor yang cukup penting dalam mengimplemtasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) itu adalah faktor lingkungan sosial. Karena untuk melakukan kegiatan-kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi untuk memajukan suatu lembaga. Maka dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi, sosial, politik, hanya berpengaruh terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dan kelurahan. Sedangkan faktor yang menonjol dan berpengaruh bagi masyarakat adalah lingkungan sosial

Adapun faktor yang cukup penting dalam mengimplementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) itu adalah faktor lingkungan sosial. Karena untuk melakukan kegiatan-kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi untuk memajukan suatu lembaga. Maka dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi, sosial, politik, hanya berpengaruh terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dan kelurahan. Sedangkan faktor yang menonjol dan berpengaruh bagi masyarakat adalah lingkungan sosial.

#### ***Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Di Kelurahan 20 Ilir D.1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang***

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor yang menjadi pendukung implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota Palembang ialah:

1. Keberadaan kelurahan, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), dan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) yang aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.
2. Suasana lembaga dan kelurahan yang dimana semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan melakukan tugas dan fungsi secara optimal.
3. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam ikut serta pada kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).

**Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Di Kelurahan 20 Ilir D.1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang adalah keterbatasan anggaran. Dengan keterbatasan anggaran menjadi penghambat dalam melakukan tugas dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 diharapkan pemerintah bisa meningkatkan anggaran pada lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) agar pelaksanaan tugas dan fungsi bisa berjalan dengan maksimal serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya di tiap kelurahan dan kelembagaannya.

### SIMPULAN

Art Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terkait implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang dapat disimpulkan yaitu:

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 sudah terimplementasikan. Namun belum cukup optimal dalam teori Van mater and Van horn baru lima variabel yang terpenuhi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, sikap/disposisi para pelaksana, komunikasi antar pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, politik. Dan satu variabel yang belum terlaksana secara optimal yaitu di variabel sumber daya.

Implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang antara lain yaitu variabel: 1) Ukuran dan Tujuan, Pada variabel ukuran dan tujuan dalam implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 sudah cukup baik, Namun. Ada beberapa tugas dan fungsi yang masih belum secara maksimal terealisasikan karena keterbatasan anggaran. 2) Sumber Daya, Variabel sumber daya memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 Saat ini yang berupa sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan kebutuhan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK). Namun, anggaran masih belum mencukupi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara merata dan untuk melakukan tugas dan fungsi yang sesuai pada PERDA nomor 4 tahun 2019 pasal 5 dan pasal 6 dengan demikian dalam faktor sumber daya belum maksimal dalam mendukung implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK). 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, Variabel karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang sudah berjalan cukup maksimal karena dengan adanya tugas dan fungsi masing masing pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dapat berjalan dengan baik. 4) Sikap/Disposisi Para Pelaksana, Sikap/disposisi para pelaksana dalam implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang diketahui bahwa sikap para pelaksana dalam lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 antara ketua dan jajaranya mereka selalu menanggapi dengan positif supaya bisa cukup maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi. 5) Komunikasi Antar Pelaksana, Komunikasi antar pelaksana implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang sudah cukup baik di lihat dari data bahwa tidak adanya mis komunikasi antara pihak internal maupun pihak eksternal di lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1. 6) Lingkungan Ekonomi, sosial, politik, Variabel lingkungan ekonomi, sosial, politik implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir. D.1 kecamatan

ilir timur I kota Palembang sudah berjalan cukup baik dan tentunya mendapatkan dukungan dari pihak lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) yang bisa menjadi hal hal positif pada kelurahan 20 ilir D.1

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

### REFERENSI

#### Artikel

- Abdus Salam, Sri Kamariyah, Ika Devy Pramudiana. (2024). peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pkk kemajet di kecamatan kedungdung kabupaten sampang. Dalam jurnal fakultas ilmu administrasi publik, 2(1),10. Universitas Dr. Soetomo surabaya.
- Ade heynayan. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. Artikel. Universitas Esa Unggul
- Amron Rehi Ranjamandu. (2019). upaya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan”. Dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik,8,359. Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Anita Dwi Rahmawati. (2015). Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern. Skripsi. Surakarta: UMS.
- Damanik, A. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat. JURNAL AT-TAGHYIR, 171.
- Dewi sadiah, metode penelitian dakwa pendekatan kualitatif dan kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h 87
- Edi Riadi. 2011. Statistika Penelitian Analisis Manual Dan IBM SPSS, Jogjakarta
- Isyabillillah, E., & Gustaman, F. A. (2023). “Implementasi Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Taman Kota Madiun”. Dalam jurnal sosiologi dan antropologi solidarity 12 (1). Universitas negeri semarang.
- Itsaini Iflatatun Azkiya dan Hendra Dedi Kriswanto, 2022.” Peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat”. Dalam jurnal pembelajaran pemberdayaan masyarakat, 5(4),726. Universitas negeri semarang.
- Krisna Syarif Hidayatulloh, Endang Indartuti, Adi Soesiantoro. 2023. “Implementasi Kebijakan Pembentukan Dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Suatu Studi Tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya)”. Dalam jurnal administrasi dan kebijakan, 22(2),147. Universitas 17 agustus 1945 surabaya.
- Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri. 2019. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura”. Dalam jurnal ekonomi,21(3), 311. Universitas Borobudur.
- Muhmmad Juli et al. 2015. “Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Pada Bidang Pembangunan Di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai”. Dalam jurnal kajian ilmu pemerintahan,1(1),28-29. Universitas islam riau.
- Putu, M., & Kusmarianto, C. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Parkir. Paradigma Jurnal Ilmu Administrasi, IV(2), 234– 252.
- Rahayu, D., & Sasman. (2017). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional ( Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Bengkulu. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 6(3), 38– 49.
- Seni Dwi Oktavia. 2017. “pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat oleh lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan di kelurahan hegarsari kecamatan pataruman kota banjar”. Dalam jurnal ilmiah ilmu pemerintahan,3(4),16. Universitas galuh.

Yohanes, B. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya1. Jurnal Politico.

**Peraturan Undang-Undang**

Peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (lpmk).

Peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

**Buku**

Kristanto, V. H. (2018). Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung.

Yulianto Kadji. (2015), formulasi dan implementasi kebijakan publik: kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas, UNG press Gorontalo.

Zuchri abdussamad. ((2021). Metode penelitian kualitatif. Makassar: CV Syakir Media Press.